

Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Muhammad Reza, Yunita Sopiana

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
[*rmuhammad675@gmail.com](mailto:rmuhammad675@gmail.com)

Abstract

The purpose of this study is to determine the analysis of Gross Regional Domestic Product, Government Investment, and Inflation on Regional Financial Independence of Banjarmasin City for the 2010 - 2019 period. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with time series data sourced from BPS Banjarmasin City and the analysis tool uses Eviews10 . The regression equation obtained is $Y = -3.561 + 0.349LnX1 - 0.082LnX2 + 0.787X3 +$

The results of this study indicate that partially the Gross Regional Domestic Product variable has a significant effect on Regional Financial Independence. While the variables of Government Investment and Inflation have no significant effect on Regional Financial Independence. Simultaneously, Gross Regional Domestic Product, government investment, and inflation have a significant effect on regional financial independence.

Keywords: *Regional Financial Independence; Gross Regional Domestic Product; Government Investment; Inflation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin periode 2010 - 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan data time series yang bersumber dari BPS Kota Banjarmasin dan alat analisisnya menggunakan Eviews10. Persamaan regresi yang di dapat adalah $Y = -3,561 + 0,349LnX1 - 0,082LnX2 + 0,787X3 + \varepsilon$

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB Perkapita mempengaruhi variabel Kemandirian Keuangan Daerah secara signifikan. Namun variabel Investasi Pemerintah serta Inflasi tidak mampu mempengaruhi variabel Kemandirian Keuangan Daerah secara signifikan. Secara bersama-sama (Simultan), PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, serta Inflasi mampu mempengaruhi variabel kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah ; PDRB Perkapita ; Investasi Pemerintah ; Inflasi

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini menggunakan pemerintahan daerah yang otonom, hal ini dapat memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Otonomi daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2001 untuk pertama-kalinya, hal itu menyebabkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan alam melimpah menyambut otonomi daerah sebagai hal yang positif, sedangkan daerah yang miskin akan sumber daya alam menyambut hal ini dengan berat hati. Otonomi daerah tidak akan sesuai untuk beberapa daerah tertinggal karena daerah tersebut biasanya

tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun penentuan arah pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas dan kepentingan masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal itu, Sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Untuk mencapai kemandirian daerah, ada beberapa instrumen fiskal yang dapat mempengaruhinya seperti produk domestik regional bruto perkapita, investasi pemerintah, dan juga inflasi. Instrumen - instrumen fiskal tersebut merupakan faktor – faktor penting yang mampu mempengaruhi pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah yang berlangsung lumayan lama, capaian kemandirian daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing ditemukan belum memuaskan. Ini mengindikasikan masih banyak daerah yang sangat tergantung bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajibannya terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan daerah kota Banjarmasin tahun 2010 – 2019:

Tabel 1
Data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain- Lain Pendapatan	Pendapatan Daerah
2010	Rp 80.510.646.971	Rp 590.099.673.558	Rp 155.685.119.199	Rp 826.295.439.728
2011	Rp 118.554.981.543	Rp 664.770.302.347	Rp 150.050.765.017	Rp 933.376.048.907
2012	Rp 138.086.121.907	Rp 758.384.384.015	Rp 301.894.557.534	Rp 1.198.365.063.456
2013	Rp 167.313.762.017	Rp 820.574.580.607	Rp 297.218.018.947	Rp 1.285.106.361.571
2014	Rp 216.427.691.790	Rp 842.336.752.332	Rp 373.824.764.582	Rp 1.432.589.208.704
2015	Rp 226.660.182.756	Rp 848.197.803.850	Rp 331.888.194.297	Rp 1.406.746.180.903
2016	Rp 247.258.423.246	Rp 1.113.815.696.695	Rp 158.566.125.520	Rp 1.519.640.245.461
2017	Rp 322.086.167.528	Rp 992.961.481.745	Rp 163.174.761.034	Rp 1.478.222.410.307
2018	Rp 277.873.887.440	Rp 1.028.151.940.256	Rp 272.344.086.598	Rp 1.578.369.914.294
2019	Rp 330.579.799.537	Rp 1.043.449.970.105	Rp 279.697.413.102	Rp 1.653.727.182.744

Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah produk domestik regional bruto perkapita, investasi pemerintah, dan inflasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis PDRB perkapita, investasi pemerintah, serta inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin.

Rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin periode 2010-2019? (2) Bagaimana pengaruh secara simultan dari variabel PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin tahun 2010-2019? (3) Bagaimana pengaruh dari variabel PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin period 2010-2019?

Penelitian ini juga bertujuan untuk : (1) Mengetahui Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Banjarmasin periode 2010-2019. (2) Mengetahui Bagaimana pengaruh secara

simultan dari PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap variabel kemandirian keuangan daerah Banjarmasin periode 2010-2019. (3) Mengetahui Bagaimana pengaruh dari PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, serta Inflasi secara parsial terhadap variabel kemandirian keuangan daerah Banjarmasin periode 2010-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengertiannya, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU no 32 tahun 2004). Hukum pertama yang mengatur pelaksanaan hak Otonomi Daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang mengatur tata cara pelaksanaan hak ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1-7.

Keuangan Daerah

Mamesah (1995:45) “keuangan daerah merupakan semua kewajiban dan hak yang bisa dinilai dengan uang, dan juga semua hal berupa barang maupun uang yang bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh daerah serta pihak lainnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan”.

Ruang lingkup keuangan daerah: a) Daerah mempunyai hak untuk memungut pajak daerah serta retribusi daerah dan juga melakukan pinjaman. b) Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan Urusan Pemerintahan serta membayar tagihan pihak ketiga. c) Penerimaan/pendapatan Daerah. d) Pengeluaran dari Daerah. e) kekayaan daerah yang dipisahkan. f) Pemerintah Daerah menguasai kekayaan pihak lain untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan kepentingan umum (pp no 12 tahun 2019).

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Halim (2007: 330) “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Untuk menganalisis rasio keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan cara, hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya yang akhirnya diketahui bagaimana suatu kecenderungan itu terjadi. berikut adalah rumus keuangan daerah menurut Halim.

$$\text{Rasio pendapatan daerah} = \frac{\text{total PAD}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ketergantungan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan daerah tanpa subsidi}} \times 100\%$$

Tabel 2

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio (%)	Rasio pendapatan daerah	Kemandirian keuangan daerah	Ketergantungan Daerah
<10,00	Sangat kurang	Sangat kurang	Sangat tinggi
10,01 – 20,00	Kurang	Kurang	Tinggi
20,01 – 30,00	Cukup	Cukup	Sedang
30,01 – 40,00	Sedang	Sedang	Cukup
40,01 – 50,00	Baik	Baik	Rendah
>50,00	Sangat baik	Sangat baik	Sangat rendah

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Dari rumus di atas bisa diketahui bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah mampu menjelaskan sejauh mana daerah bergantung dengan sumber dana yang berasal dari luar daerah. Apabila rasio ini semakin tinggi maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak luar semakin rendah, demikian juga kebalikannya. Tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah mampu dijelaskan dalam rasio keuangan daerah ini.

PDRB Perkapita

Produk Domestik Bruto adalah penghasilan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu yang berupa nilai barang atau jasa yang berasal dari faktor – faktor produksi dari negaranya ataupun dari penduduk negara lain. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai jasa dan barang yang diproduksi di suatu regional tertentu dengan kurun waktu yang telah ditentukan, biasanya satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai yang ditambahkan dari hasil seluruh usaha di suatu wilayah, bisa juga diartikan total nilai akhir jasa dan barang yang dihasilkan seluruh unit ekonomi pada suatu regional.

PDRB bisa di hitung menggunakan 3 pendekatan, pertama pendekatan pengeluaran, kedua pendekatan produksi, dan ketiga pendekatan pendapatan.

1. PDRB dari pendekatan Pengeluaran adalah hasil nilai tambah dari seluruh Pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan terakhir pendapatan (ekspor – impor) dari suatu wilayah.
2. PDRB dari pendekatan Produksi adalah seluruh total nilai tambah dari jasa dan barang yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
3. PDRB dari pendekatan Pendapatan adalah jumlah pendapatan (upah, gaji, sewa, dan bunga) yang diperoleh dari faktor produksi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Nilai dari PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dari suatu wilayah. PDRB perkapita adalah jumlah dari nilai tambah yang diperoleh dari semua kegiatan ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk. Sebab itu, tinggi atau rendahnya populasi penduduk akan mempengaruhi nilai dari PDRB perkapita, kemudian tinggi atau rendahnya nilai PDRB tergantung dari potensi SDA dan faktor produksi di daerah tersebut. Berikut adalah data PDRB perkapita Kota Banjarmasin Periode 2010-2019:

Tabel 3
Data PDRB Perkapita Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	PDRB perkapita	
2010	Rp	15.517.808
2011	Rp	17.649.655
2012	Rp	19.629.517
2013	Rp	23.753.140
2014	Rp	24.847.360
2015	Rp	25.926.230
2016	Rp	27.202.250
2017	Rp	28.582.250
2018	Rp	30.055.630
2019	Rp	31.545.470

Sumber : Badan Pusat Statistik

Investasi Pemerintah

Penanaman modal atau investasi adalah semua bentuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal luar/asing dalam rangka melakukan usaha di wilayah Indonesia (UU no 25 tahun 2007). Investasi terbagi menjadi 2, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pelaku dari dalam negeri dengan modal yang sumbernya dari dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pelaku dari luar/asing, yang seluruh modalnya bersumber dari luar negeri ataupun ada yang berkerja sama dengan pelaku dari dalam negeri. Investasi merupakan pengeluaran produsen dalam rangka pembelian jasa dan barang dengan tujuan investasi (Boediono, 1990).

Pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan investasi modal. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang kuat antara belanja investasi pada pembangunan/infrastruktur dengan tingkat desentralisasi (Lin dan Liu, 2000). Menurut (Madjidi, 1997) Strategi dari pengalokasian anggaran infrastruktur/pembangunan akan mampu menjadi dorongan dan mampu mempercepat pembangunan ekonomi nasional, dan juga bisa menjadi alat dalam mengurangi ketimpangan dari suatu daerah. Berikut adalah data Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin Periode 2010-2019:

Tabel 4
Data Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	Investasi Pemerintah
2010	Rp 233.177.400.000
2011	Rp 177.976.350.000
2012	Rp 184.211.070.000
2013	Rp 363.734.600.000
2014	Rp 335.307.940.000
2015	Rp 338.636.160.000
2016	Rp 342.020.390.000
2017	Rp 228.414.010.000
2018	Rp 287.776.400.000
2019	Rp 425.502.480.000

Sumber : Badan Pusat Statistik

Inflasi

Definisi Inflasi dari Bank Indonesia adalah kenaikan dari harga jasa dan barang secara umum serta berkelanjutan atau terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi disebabkan tekanan penawaran, tekanan permintaan, tekanan dari ekspektasi masyarakat terhadap inflasi tersebut. Faktor terjadinya inflasi dari tekanan penawaran dikarenakan depresiasi nilai tukar, inflasi luar negeri dari negara yang menjadi mitra dagang juga ikut memberikan dampak, campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditas yang semakin meningkat, dan terjadi bencana alam ataupun terganggunya distribusi yang bisa mempengaruhi perekonomian. Faktor terjadinya inflasi dari tekanan permintaan dikarenakan meningkatnya permintaan jasa dan barang namun ketersediaannya terbatas. Faktor terjadinya inflasi akibat ekspektasi masyarakat dikarenakan masyarakat berekspektasi terlalu tinggi terhadap harga di masa yang akan datang sehingga mereka berbondong-bondong membeli terlebih dahulu sehingga menyebabkan kelangkaan yang akan membuat harga akan meningkat.

Beberapa penyebab tetap inflasi dikarenakan jumlah uang beredar melebihi batas normal atau terlalu banyak, nilai upah yang tinggi, dan juga defisit anggaran. Seringkali diperkirakan penyebab inflasi dikarenakan upah yang meningkat, akibat meningkatnya upah adalah jumlah uang beredar akan bertambah banyak yang akan menyebabkan konsumsi masyarakat meningkat sehingga terjadi kelangkaan pada beberapa barang dan jasa, inilah awal mula terjadi inflasi. Berikut adalah data Inflasi Kota Banjarmasin Periode 2010-2019.

Tabel 5
Data Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	Inflasi
2010	9,06%
2011	3,98%
2012	5,96%
2013	6,98%
2014	7,16%
2015	5,03%
2016	3,68%
2017	3,82%
2018	2,63%
2019	4,15%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Mirsan et.al (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Investasi, PDRB Perkapita dan PAD terhadap Derajat Kemandirian Fiskal di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Secara Parsial, masing-masing dari 3 variabel bebas (Investasi, PDRB perkapita, PAD) mampu mempengaruhi derajat kemandirian fiskal di Sulawesi Selatan secara signifikan positif. Secara Simultan, derajat kemandirian fiskal di pengaruhi oleh Investasi (x1), PDRB Perkapita (x2), Pendapatan asli daerah (x3) secara signifikan positif.

Penelitian Kurniawan et.al (2017) yang berjudul Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat. Tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat.

Penelitian Muslim et.al (2019) yang berjudul Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari menyatakan bahwa Variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kendari.

Penelitian Ladjin (2008) yang berjudul Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah) menjelaskan bahwa Secara Parsial, Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. PDRB Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara Simultan, Investasi dan PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan juga penelitian ini berlokasi di Banjarmasin, Penelitian ini berlokasi di Banjarmasin, lebih tepatnya penelitian ini meneliti data PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, Inflasi, dan kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin periode 2010 – 2019 untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel. Unit analisis yang diteliti adalah PDRB perkapita, Investasi pemerintah, Inflasi, dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2019.

Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah diukur menggunakan satuan Persen. PDRB Perkapita (X1) adalah hasil perhitungan dari total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB Perkapita dalam penelitian ini menggunakan satuan Rupiah. Investasi Pemerintah (X2) merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembelian jasa, barang, ataupun asset dengan tujuan investasi. Investasi Pemerintah dalam penelitian ini menggunakan satuan Rupiah. Inflasi (X3) adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi diukur menggunakan satuan Persen.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel

$\ln X_1$ = Log Natural PDRB Perkapita

$\ln X_2$ = Log Natural Investasi Pemerintah

X3 = Inflasi

ε = Error

HASIL DAN ANALISIS

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan cara membagi Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan kemudian di kali dengan seratus persen. Setelah memasukkan data dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kemudian menghitung menggunakan rumus tersebut maka di dapat hasil rasio kemandirian daerah sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Kategori Kemandirian Daerah
2010	Rp. 80.510.646.971	Rp 590.099.673.558	13,64%	Kurang
2011	Rp. 118.554.981.543	Rp 664.770.302.347	17,83%	Kurang
2012	Rp. 138.086.121.907	Rp 758.384.384.015	18,20%	Kurang
2013	Rp. 167.313.762.017	Rp 820.574.580.607	20,38%	Cukup

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Kategori Kemandirian Daerah
2014	Rp 216.427.691.789	Rp 842.336.752.332	25,69%	Cukup
2015	Rp. 225.821.059.656	Rp 848.197.803.850	26,62%	Cukup
2016	Rp. 247.258.264.474	Rp 1.113.816.000.000	22,19%	Cukup
2017	Rp. 324.977.988.614	Rp 992.961.481.736	32,73%	Sedang
2018	Rp. 277.873.887.440	Rp 1.028.151.940.256	27,03%	Cukup
2019	Rp. 330.718.653.036	Rp 1.044.858.915.105	31,65%	Sedang

Sumber : Data diolah dari data primer

Hasil Analisis Regresi

Pada penelitian ini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis data pada suatu penelitian yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat secara simultan maupun secara parsial. Analisis ini juga dapat memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami penurunan atau peningkatan.

Tabel 7

Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3,5617	0,8959	-3,9751	0,0073
LnX1	0,3495	0,0958	3,6479	0,0107
LnX2	-0,0827	0,0581	-1,4227	0,2047
X3	0,7870	0,8366	0,9406	0,3832

Sumber : Data diolah dari data primer

Berdasarkan Tabel 7 di atas, berikut persamaan model regresi linear berganda penelitian ini :

$$Y = -3,561 + 0,349\text{LnX1} - 0,082\text{LnX2} + 0,787\text{X3} + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -3,561 menunjukkan bahwa apabila nilai dari seluruh variabel bebas sama dengan 0, maka nilai kemandirian keuangan daerahnya menurun sebesar 3,561%.
2. Nilai X1 sebesar 0,349 menunjukkan bahwa apabila nilai dari (X1)PDRB Perkapita Naik 1 satuan, maka nilai kemandirian keuangan daerahnya akan meningkat sebesar 0,349% dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
3. Nilai X2 sebesar -0,082 menunjukkan bahwa apabila nilai dari (X2)Investasi Pemerintah Naik 1 satuan, maka nilai kemandirian keuangan daerahnya akan menurun sebesar 0,082% dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
4. Nilai X3 sebesar 0,787 menunjukkan bahwa apabila nilai dari (X3)Inflasi Naik 1 satuan, maka nilai kemandirian keuangan daerahnya meningkat sejumlah 0,787% dengan asumsi tidak berubahnya variabel yang lain.

Uji t-Statistik

PDRB Perkapita (X1)

Hasil pengujian uji t-statistik dapat dilihat bahwa nilai probabilita PDRB Perkapita senilai 0,0107 hal ini lebih sedikit nilainya dibandingkan tingkat alpha yang nilainya 0,05 dengan ini berarti bahwa PDRB Perkapita mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi PDRB suatu wilayah, maka semakin meningkat pula potensi penerimaan wilayah tersebut. Semakin meningkat penerimaan suatu wilayah maka kemandirian keuangan daerah berpeluang mengalami peningkatan juga.

Investasi Pemerintah (X2)

Hasil pengujian uji t-statistik dapat dilihat bahwa nilai probabilita Investasi Pemerintah senilai 0,2047 hal ini lebih banyak nilainya dibandingkan tingkat alpha yang nilainya 0,05 dengan ini berarti bahwa Investasi Pemerintah tidak mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Hal ini disebabkan Investasi Pemerintah di Banjarmasin merupakan Investasi disektor infrastruktur/pembangunan berupa transportasi dan konstruksi sehingga memberikan kontribusi yang sedikit terhadap penerimaan daerah di Kota Banjarmasin yang akhirnya membuat Investasi belum mampu mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di kota Banjarmasin.

Inflasi (X3)

Hasil pengujian uji t-statistik dapat dilihat bahwa nilai probabilita Inflasi senilai 0,3832 hal ini lebih banyak nilainya dibandingkan tingkat alpha yang nilainya 0,05 dengan ini berarti bahwa Inflasi tidak mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Hal ini terjadi karena Inflasi menyebabkan harga jasa dan barang mengalami peningkatan, yang akan menyebabkan PAD ikut mengalami peningkatan karena Pajak Daerah akan meningkat. Namun hal sebaliknya juga akan terjadi, dengan meningkatnya harga barang dan jasa, masyarakat akan menekan konsumsinya sehingga pajak daerah tidak akan mengalami peningkatan yang akan membuat Inflasi tidak mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Jadi berpengaruh atau tidaknya inflasi ini tergantung pola konsumtif masyarakat saat terjadinya Inflasi. Apabila Inflasi tidak mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah maka Inflasi juga tidak mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Maka dari itu Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Uji f-Statistik

Uji ini dimasukkan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Pengambilan keputusan dilakukan sebagai berikut, apabila nilai Probabilita f-statistiknya lebih tinggi dari atau sama jumlahnya dengan tingkat alpha $\geq 0,05$ berarti variabel independen tersebut tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Namun, apabila nilai Probabilita f-statistiknya lebih rendah jumlahnya dari tingkat alpha $\leq 0,05$ berarti variabel independen tersebut mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berikut adalah tabel hasil pengujian dari f-statistik :

Tabel 8
Hasil Uji f-statistik

Keterangan	Nilai
F-statistic	12,76130
Prob(F-statistic)	0,005156

Sumber : Data diolah dari data primer

Berdasarkan tabel 8 tersebut, nilai dari probabilitas f-statistiknya adalah $0,005 < \alpha = 5\%$ maka variabel PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan model regresi dalam memprediksi variabel terikat, dalam penelitian ini hasil uji determinasi R^2 digunakan untuk melihat seberapa baik variabel bebas PDRB perkapita (X1), Investasi pemerintah (X2), dan Inflasi (X3) dalam menjelaskan variabel terikat yaitu Kemandirian keuangan daerah (Y) di Kota Banjarmasin :

Tabel 9
Hasil Uji R-square

Keterangan	Nilai
R-squared	0,864511
Adjusted R-squared	0,796766

Sumber : Data diolah dari data primer

Dapat dilihat dari tabel 9, nilai adjusted R^2 berjumlah 0.796 dengan ini dapat diketahui bahwa variabel variabel PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi mampu menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 79,6%. Sedangkan sisanya sebesar 20.4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implementasi praktis pada kebijakan pemerintah, dalam hal ini bahwa pemerintah daerah Kota Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan nilai Investasi yang dilakukan karena hal itu akan meningkatkan penerimaan daerah di periode-periode yang akan datang. Selain itu pemerintah harus mampu membuat nilai Inflasi dengan kenaikan yang stabil, saat Inflasi yang stabil terjadi maka pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi yang mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun saat Inflasi terlalu tinggi atau tidak terkendali maka hal itu akan menghambat pertumbuhan dikarenakan masyarakat menekan tingkat konsumsinya. Selanjutnya pemerintah harus mampu meningkatkan PDRB perkapita daerahnya, yang mana variabel ini mampu mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin secara langsung. Dengan hal-hal tersebut, Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin akan mengalami peningkatan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini sangat disadari oleh peneliti, adapun keterbatasan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan hasil data dari Badan Pusat Statistik dan kementerian keuangan. Oleh sebab itu peneliti kebingungan mau menggunakan data yang mana.
2. Terbatasnya konsultasi dengan dosen pembimbing. Hal ini di karenakan masa pandemi yang belum berakhir sehingga hanya bisa konsultasi secara online yang menyebabkan banyak kekurangan dalam penelitian ini.
3. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh peneliti namun karena kurangnya ilmu dan pengalaman saya sebagai peneliti saya tidak mampu menyadari kesalahan saya, oleh karena itu bimbingan dari dosen dan koreksi dari pembaca sangat saya perlukan untuk hasil terbaik dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai macam perhitungan dan pengujian dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Data Kemandirian Keuangan Daerah selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2010 sampai 2019 juga mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 rasio kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin berada di kondisi kurang mandiri. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 rasio kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin berada di kondisi cukup mandiri. Kemudian di tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin berada di kondisi sedang mandiri. Lalu di tahun 2018 rasio kemandirian keuangan daerah menurun kembali berada di kondisi cukup mandiri. Akhirnya tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kondisi sedang mandiri.

2. Hasil uji f -statistik untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau secara simultan di peroleh hasil bahwa PDRB Perkapita (X_1), Investasi Pemerintah (X_2), Inflasi (X_3) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah (Y) kota Banjarmasin yang dapat dilihat dari nilai prob. pada f -statistic sebesar $0,005 < \alpha < 0,05$ artinya dapat disimpulkan bahwa PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Hasil uji t -statistik variabel PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin. sedangkan variabel Investasi pemerintah dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin. Sehingga diantara ketiga variabel bebas yaitu PDRB Perkapita (X_1), Investasi Pemerintah (X_2), Inflasi (X_3), hanya variabel PDRB Perkapita (X_1) saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di Kota Banjarmasin.

Saran

Ada beberapa saran dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini khususnya para pengambil keputusan dalam menentukan dan membuat kebijakan di Kota Banjarmasin. Adapun saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan penambahan Jumlah data sehingga hasil yang didapatkan akan lebih memuaskan.
2. Pemerintah diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan PDRB Perkapita kota Banjarmasin sehingga kemandirian keuangan daerah kota Banjarmasin juga akan ikut meningkat.

Pemerintah kota Banjarmasin juga disarankan agar tidak terlalu bertumpu pada pendapatan transfer yang di berikan oleh pusat dan lebih mengembangkan potensi daerahnya sendiri sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah di kota Banjarmasin.

BIBLIOGRAPHY

- Halim, a., & Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. jakarta: salemba empat.
- Mamesah. (1995). *Pengertian keuangan daerah*.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Situs Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin di <https://banjarmasinkota.bps.go.id/> (Diakses pada 25 Juni 2021)
- Ali, S., & Mardiana, A. (2020). *Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato*. MADANI: Jurnal Pengabdian Ilmiah, 149-179.
- Imawan, R. (2014). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012*. 147-154.
- Kamila, A. (2016). *Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi dan Jumlah Penduduk terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta)*.
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2017). *Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi*. INOVASI, 68-77.
- Ladjin, N. (2008). *Analisis Kemandirian FIskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)*.

-
- Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). *Pengaruh Investasi, PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Derajat Kemandirian Fiskal (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan)*. PARADOKS : JURNAL ILMU EKONOMI, 83-98.
- Muslim, C., Mallongi, S., & Rahman, Z. (2019). *Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari*. PARADOKS : JURNAL ILMU EKONOMI, 58-65.
- Pamungkas, W. S. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)*.
- Pratiwi, S. O. (2016). *Pengaruh Penduduk dan PDRB Perkapita terhadap Kemandirian Keuangan melalui PKB dan BBNKB*.
- Sulistyowati, I. (2011). *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2010*.
- Boediono. (1990). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPF E Yogyakarta